

Strategic Planning in School-Based Management: Evidence from Urban and Rural Schools

Khotimah Herliana¹ *, Asep Saepul Bahri²

¹Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kramat 98

²Universitas Islam 45, Jl. Cut Meutia No. 83 Kota Bekasi, 17113

E-mail: khotimah.khl@bsi.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2095>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 July 2025

Revised: 23 July 2025

Accepted: 2 August 2025

Kata Kunci

Perencanaan strategis,
kapasitas kelembagaan,
manajemen berbasis sekolah.

Keywords

Strategic planning,
Institutional capacity, school-
based management



ABSTRACT

Perencanaan strategis merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas tata kelola Pendidikan di sekolah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat implementasi perencanaan yang strategis antara sekolah negeri yang berada pada wilayah urban dan rural. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey terhadap 68 kepala sekolah yang dipilih melalui teknik *stratified random sampling*. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tertutup berbasis skala Likert, yang divalidasi melalui uji korelasi Pearson dan reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji-t independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah urban memiliki skor rata-rata implementasi perencanaan strategis yang lebih tinggi ($M = 4,12$; $SD = 0,43$) dibandingkan sekolah rural ($M = 3,45$; $SD = 0,51$), dengan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Aspek monitoring dan evaluasi serta pelibatan pemangku kepentingan merupakan komponen yang menunjukkan disparitas terbesar. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan yang memerlukan intervensi berbasis konteks. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya strategi partisipatif, tata kelola yang inklusif, dan dukungan sumber daya yang adaptif dalam praktik perencanaan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah rural.

Strategic planning is a crucial element in the implementation of school-based management (SBM) aimed at improving educational governance effectiveness. This study investigates the differences in strategic planning implementation between public junior high schools located in urban and rural areas. A quantitative survey approach was employed involving 68 school principals selected through stratified random sampling. Data were collected using a closed-ended Likert-scale questionnaire, validated through Pearson correlation and Cronbach's Alpha reliability test. The data were analyzed using descriptive statistics and an independent samples t-test. The results reveal that urban schools scored significantly higher in strategic planning implementation ($M = 4.12$; $SD = 0.43$) compared to rural schools ($M = 3.45$; $SD = 0.51$), with a statistically significant difference ($p < 0.05$). The most pronounced disparities were found in the aspects of monitoring and evaluation as well as stakeholder involvement. These findings indicate an institutional capacity gap that requires context-sensitive intervention. This study reinforces previous research emphasizing the importance of participatory strategies, inclusive governance, and adaptive resource support in strategic planning practices. It recommends affirmative policy measures to strengthen the institutional capacity of rural schools.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rasifah, et al (2025). Hubungan Pengetahuan K3 Dengan Perilaku Aman Pekerja Di Salon X Kelapa Gading: Studi Korelasional Kuantitatif, 4(1), 3164-3170, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2095>

PENDAHULUAN

Perencanaan yang strategis dalam konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan satu instrument utama dalam pencapaian efektivitas pengelolaan sekolah. Dalam kerangka otonomi sekolah, maka setiap sekolah senantiasa diharapkan untuk dapat menyusun arah pengembangan institusi yang lebih berorientasi pada pencapaian mutu melalui proses perencanaan yang lebih sistematis, terukur, dan juga partisipatif. Idealnya, dalam perencanaan strategis ini harus disusun berdasarkan visi jangka Panjang sekolah yang selaras dengan kebijakan Pendidikan nasional, serta harus mempertimbangkan pula pada kebutuhan local yang lebih spesifik. Adanya keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah serta masyarakat, menjadi indicator penting dalam keberhasilan implementasi MBS yang berbasis strategis.

Perencanaan strategis dalam konteks pendidikan juga mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola lembaga publik yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam kerangka ini, sekolah diposisikan tidak semata sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki tanggung jawab merumuskan arah kebijakan internal yang kontekstual dan berkelanjutan. Prinsip perencanaan strategis menuntut sekolah untuk mampu mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal sekaligus mengelola kekuatan dan kelemahan internal sebagai dasar penyusunan program prioritas.

Regulasi pendidikan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, telah memberikan ruang keleluasaan bagi sekolah untuk menyusun perencanaan strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, implementasi perencanaan strategis di sekolah-sekolah masih menghadapi beragam tantangan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia, ketersediaan data yang akurat, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung proses reflektif dan evaluatif.

Selain itu, aspek geografis dan spasial turut menjadi variabel penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah urban umumnya memiliki akses lebih besar terhadap teknologi informasi, pelatihan manajerial, dan jaringan kemitraan strategis. Sebaliknya, sekolah di wilayah rural seringkali menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan infrastruktur, isolasi geografis, dan rendahnya dukungan teknis dari instansi terkait. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan eksekusi strategi di tingkat sekolah.

Lebih jauh, keberhasilan perencanaan strategis dalam kerangka MBS sangat ditentukan oleh adanya pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan bermakna. Komite sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, serta dunia usaha merupakan aktor-aktor strategis yang dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan dari rencana yang disusun. Ketika proses penyusunan strategi hanya melibatkan internal sekolah secara sempit, maka rencana strategis cenderung bersifat administratif dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil komunitas belajar.

Dalam praktek idealnya, sekolah baik yang berada di wilayah urban maupun rural, tentunya dituntut untuk dapat memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup untuk mampu merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi rencana strategis secara berkelanjutan. Perencanaan strategis dalam MBS tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga harus mencerminkan orientasi peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Perbedaan geografis seharusnya tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan perencanaan strategis apabila prinsip-prinsip dasar partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat satuan pendidikan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan terjadinya ketimpangan kapasitas antara sekolah di wilayah urban dan rural dalam menyusun serta mengimplementasikan perencanaan strategis. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, pendampingan teknis, serta sumber daya manusia yang profesional dibandingkan dengan sekolah-sekolah di wilayah rural. Penelitian yang dilakukan oleh (Asyibli et al., 2025) mengungkapkan bawah

implementasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu mampu meningkatkan keterlibatan, akuntabilitas, dan juga komitmen dari para pemangku kepentingan dalam proses Pendidikan. (Hasan Baharudin et al., 2022) mengungkapkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menunjukkan bahwa prinsip yang dipakainya adalah sebagai berikut, pertama, yakni prinsip kemandirian, dalam hal ini setiap tentunya setiap sekolah memiliki visi, misi, dan juga tujuannya masing-masing. Kedua, yakni prinsip desentralisasi, hal ini dimana sekolah memiliki kewenangan dan juga otonomi secara penuh. Ketiga, yakni adanya prinsip fleksibilitas, ini merupakan hal yang dimana setiap sekolah diperbolehkan membuat keputusan atas sekolah itu sendiri baik dalam menangani permasalahan internal maupun kondisi eksternal sesuai dengan kondisi sekolahnya, yang tentunya hal ini berlaku juga untuk sekolah di tingkat dasar.

Selain itu menurut hasil penelitian dari (Agustin & Effane, 2022) mengungkapkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan koordinasi dan juga penyelarasan sumber daya yang digunakan sekolah secara mandiri, melalui input manajemen yang beragam, untuk mencapai tujuan sekolah dalam rangka Pendidikan nasional dengan melibatkan langsung semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan (partisipatif). Sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Sukmayadi, 2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah di daerah rural masih mengalami kendala dalam memahami prosedur perencanaan strategis, terbatasnya pelibatan aktor lokal, serta minimnya dukungan teknologi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan sistemik dalam penerapan prinsip MBS antar wilayah.

Sejumlah studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya perencanaan strategis dalam mendukung efektivitas manajemen sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sosial dan Teknologi & Wali, 2025) bahwa implementasi manajemen sekolah di Mts Negeri Ambon sangat baik, hal ini terlihat dari masing-masing bidang saling berkoordinasi dan juga membangun komunikasi sehingga pekerjaannya dapat terintegrasi dengan baik. Selain itu dari hasil penelitian (Rosyada et al., 2019) menegaskan bahwa integrasi perencanaan strategis dalam kerangka MBS mampu meningkatkan efisiensi organisasi dan memperkuat partisipasi komunitas. Sementara itu, riset oleh (Nurkolis, 2021) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki dokumen rencana strategis yang jelas dan aplikatif cenderung lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebijakan dan krisis pendidikan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Fitriani & Permana, 2022), yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan strategis berkorelasi dengan kinerja akademik sekolah, terutama di lingkungan urban yang memiliki sumber daya relatif lebih memadai.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas implementasi perencanaan strategis di sekolah, sebagian besar belum mengkaji secara komparatif antara konteks urban dan rural. Sementara itu, variabel spasial justru memiliki pengaruh signifikan terhadap karakteristik organisasi sekolah, pola kepemimpinan, dan pendekatan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya penguatan pendekatan berbasis wilayah dalam pengembangan kebijakan pendidikan, agar proses perencanaan strategis dapat berjalan secara relevan dan adil.

Selain itu pula telah banyak penelitian yang mengeksplorasi peran perencanaan strategis dalam MBS, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik membandingkan dinamika perencanaan strategis antara sekolah di wilayah urban dan rural dengan pendekatan kontekstual yang mendalam. Padahal, karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis kedua wilayah tersebut sangat memengaruhi proses perencanaan dan implementasinya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana konteks lokal memediasi efektivitas perencanaan strategis di bawah payung MBS, yang dapat menjadi pijakan penting dalam formulasi kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap ketimpangan wilayah.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik serta tantangan utama dalam pelaksanaan perencanaan strategis di sekolah urban dan rural, yang selama ini belum banyak disoroti secara komparatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis perbedaan pelaksanaan perencanaan strategis pada kedua tipe sekolah, serta mengkaji sejauh mana konteks lokal memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis dalam kerangka MBS. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model perencanaan strategis yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah secara merata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh data empiris mengenai praktik perencanaan strategis dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) di wilayah urban dan rural. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan perbedaan pola dan tingkat implementasi perencanaan strategis secara terukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh (Susila et al., 2019) bahwa survey riset itu dikembangkan sebagai salah satu bentuk pendekatan positif pada ilmu-ilmu sosial, selain itu juga bahwa hasil dari survey dapat digunakan untuk membuat prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, terutama yang didalamnya berlaku hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah jenjang SMP negeri di dua kabupaten/kota, masing-masing mewakili wilayah urban dan rural di Provinsi Jawa Tengah. Teknik penarikan sampel menggunakan *stratified random sampling*, dengan strata berdasarkan letak geografis sekolah (urban vs. rural). Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, terdapat total 210 sekolah negeri yang menjadi populasi target, terdiri dari 120 sekolah urban dan 90 sekolah rural. Menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi (e) sebesar 10%, jumlah sampel dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{210}{1 + 210(0,1)^2} = \frac{210}{1 + 2,1} = \frac{210}{3,1} \approx 68$$

Dari hasil perhitungan tersebut, ditetapkan jumlah responden sebanyak 68 kepala sekolah, yang terdiri atas 38 kepala sekolah dari wilayah urban dan 30 kepala sekolah dari wilayah rural.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator perencanaan strategis dalam MBS menurut (Rosyada et al., 2019) dan (Nurkolis, 2021), meliputi lima aspek utama: (1) visi dan misi sekolah, (2) analisis SWOT, (3) perumusan program prioritas, (4) pelibatan pemangku kepentingan, dan (5) monitoring dan evaluasi rencana strategis. Kuesioner menggunakan skala Likert 1–5, dari "sangat tidak sesuai" hingga "sangat sesuai".

Validitas instrumen diuji melalui analisis korelasi Pearson pada 30 responden uji coba di luar sampel utama. Seluruh item menunjukkan nilai korelasi > 0,30 dan dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,873 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk memaparkan distribusi nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing indikator. Selanjutnya, dilakukan **uji-t independen** untuk mengetahui perbedaan signifikan tingkat implementasi perencanaan strategis antara sekolah urban dan rural. Pengujian dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

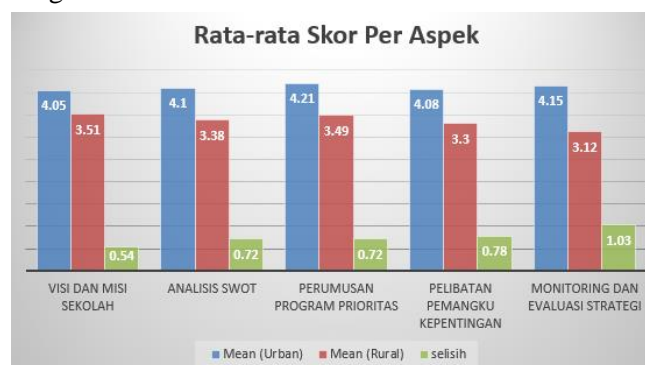
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat implementasi perencanaan strategis di sekolah urban memiliki rata-rata skor total sebesar **4,12** (SD = 0,43), sedangkan sekolah rural memiliki rata-rata skor sebesar **3,45** (SD = 0,51). Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam kapasitas institusional sekolah dalam merumuskan dan melaksanakan perencanaan strategis. Skor tertinggi pada sekolah urban terdapat pada aspek "perumusan program prioritas" (mean = 4,21), sementara skor terendah di sekolah rural adalah pada aspek "monitoring dan evaluasi" (mean = 3,12). Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan hanya terletak pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga dalam kualitas proses manajerial yang mendasari perencanaan.

Dari hasil penelitian dapat terlihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rata-rata skor per aspek perencanaan strategis sekolah urban dan rural (N = 68)

No.	Aspek Perencanaan Strategis	Urban (Mean)	Rural (Mean)	Selisih
1.	Visi dan Misi Sekolah	4,05	3,51	0,54
2.	Analisis SWOT	4,10	3,38	0,72
3.	Perumusan Program Prioritas	4,21	3,49	0,72
4.	Pelibatan Pemangku Kepentingan	4,08	3,30	0,78
5.	Monitoring dan evaluasi strategi	4,15	3,12	1,03
	Total Skor Rata-rata	4,12	3,45	0,67

Dari hasil tabel diatas dapat kita perbedaan rata-rata skor yang didapatkan dengan lebih jelas melalui gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik rata-rata skor per aspek MBS

Sedangkan untuk melihat bagaimana hasil uji perbedaan signifikan antara kedua kelompok, dilakukan uji-t independen terhadap skor total perencanaan strategis. Hasil uji menunjukkan nilai $t(66) = 5,493$, dengan $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara sekolah urban dan rural dalam hal implementasi perencanaan strategis. Secara statistik, ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, latar geografis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas proses perencanaan strategis di tingkat sekolah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa aspek yang paling bermasalah di sekolah rural adalah pada tahapan *monitoring dan evaluasi strategi*, dengan selisih skor yang paling tinggi (1,03 poin) dibandingkan dengan sekolah urban. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal dan pelaporan kinerja strategis di sekolah rural. Ketiadaan dukungan teknologi, keterbatasan pelatihan manajerial, serta rendahnya literasi data menjadi penyebab utama lemahnya sistem monitoring yang terstruktur. Sebaliknya, sekolah urban lebih terfasilitasi dalam mengakses data dan memanfaatkan sistem manajemen berbasis digital.

Dari sisi partisipasi, perbedaan skor sebesar 0,78 pada aspek “pelibatan pemangku kepentingan” menjadi indikator bahwa sekolah rural masih menghadapi kendala dalam membangun sinergi dengan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Hasil ini sejalan dengan temuan (Fitriani & Permana, 2022) yang menyatakan bahwa pelibatan pemangku kebijakan dalam perencanaan pendidikan dapat meningkatkan kualitas program pendidikan, memperkuat dukungan masyarakat, dan juga mampu menciptakan keterlibatan dan juga keberlanjutan. Selain itu juga dari hasil penelitian (Wahyudi & Sukmayadi, 2020) yang menyebutkan bahwa pelibatan aktor lokal dalam perencanaan strategis di sekolah rural seringkali bersifat simbolik dan tidak berlanjut ke proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak langsung terhadap kurangnya legitimasi dan efektivitas dari strategi yang telah dirumuskan.

Secara teoritik, hasil penelitian ini memperkuat argumen (Rosyada et al., 2019) bahwa perencanaan strategis yang efektif memerlukan keterpaduan antara visi institusional dengan praktik partisipatif yang didukung oleh sumber daya yang memadai. Meskipun sekolah urban menunjukkan kinerja yang lebih tinggi, capaian tersebut tidak semata-mata karena akses sumber daya, tetapi juga karena adanya budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Di sisi lain, sekolah rural memerlukan intervensi sistemik berupa pelatihan manajemen, penguatan kapasitas evaluasi, dan peningkatan dukungan teknologi.

Selain itu, bahwa hasil penelitian ini juga mampu memperkuat pendapat (Junindra et al., 2022) bahwa manajemen berbasis sekolah ini mampu memberikan solusi untuk meningkatkan mutu Pendidikan itu sendiri, melalui kerjasama dari semua pihak dari mulai kepala sekolah, guru, orang tua Siswa, serta *stackholder* lainnya, selain itu juga ada sarana dan prasarana, motivasi, konsep diri, kemandirian belajar serta minat belajar Siswa itu sendiri. Maka dengan demikian, bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini tentunya akan memunculkan keunggulan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada tahap monitoring berupa evaluasi program.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis dalam MBS belum berjalan secara merata di semua wilayah. Kesenjangan ini tidak hanya berimplikasi pada perbedaan

kinerja institusional, tetapi juga pada potensi terjadinya disparitas kualitas pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas perencanaan strategis di sekolah rural melalui penyediaan pendampingan teknis dan alokasi sumber daya berbasis kebutuhan lokal. Implikasi praktis dari temuan ini menyoroti perlunya desain kebijakan desentralisasi yang lebih responsif terhadap tantangan geografis dan sosial-ekonomi.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini secara tegas memperlihatkan bahwa perencanaan strategis dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) mengalami disparitas implementasi antara sekolah-sekolah yang berada di wilayah urban dan rural. Melalui pendekatan survei dengan melibatkan 68 responden kepala sekolah negeri jenjang SMP, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa sekolah di wilayah urban menunjukkan tingkat implementasi perencanaan strategis yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sekolah rural. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan disparitas dalam ketersediaan sumber daya, tetapi juga menggambarkan kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan budaya organisasi dalam menginternalisasi prinsip-prinsip strategis MBS.

Secara empiris, hasil uji-t independen menunjukkan nilai signifikansi yang mendukung hipotesis penelitian, yaitu bahwa konteks geografis berkontribusi signifikan terhadap efektivitas implementasi perencanaan strategis. Aspek monitoring dan evaluasi strategi, yang mencatat selisih tertinggi antara dua wilayah, memperlihatkan bahwa dimensi pengawasan dan pengukuran kinerja strategis merupakan titik lemah utama dalam konteks rural. Hal ini memperkuat temuan Wahyudi dan Sukmayadi (2020) terkait terbatasnya kapasitas teknis dan kultural sekolah rural dalam menjalankan proses reflektif dan evaluatif terhadap pelaksanaan rencana strategis. Kelemahan pada aspek ini secara langsung berdampak pada ketidakselarasan antara perencanaan dan pencapaian kinerja pendidikan.

Di sisi lain, sekolah urban menunjukkan tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi dalam aspek perumusan program prioritas dan pelibatan pemangku kepentingan. Capaian ini sejalan dengan hasil studi (Rosyada et al., 2019) dan (Nurkolis, 2021) yang menegaskan bahwa perencanaan strategis yang partisipatif dan terstruktur merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan efisiensi kelembagaan serta daya tanggap terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Selain itu, (Fitriani & Permana, 2022) turut menekankan bahwa rencana strategis yang dirancang secara adaptif memungkinkan sekolah untuk lebih siap menghadapi tantangan eksternal dan memperkuat kualitas hasil belajar siswa.

Dengan demikian, dari keseluruhan proses analisis yang diawali dengan landasan normatif dalam pendahuluan, dilanjutkan dengan pemaparan metodologis berbasis survei kuantitatif, hingga eksplorasi pembahasan berbasis data, dapat ditarik benang merah bahwa perencanaan strategis dalam kerangka MBS tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan dokumen atau kebijakan formal, tetapi juga oleh kapasitas aktual sekolah dalam menerjemahkan strategi ke dalam tindakan yang kontekstual dan terukur. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya pendekatan berbasis wilayah (*place-based approach*) dalam merancang kebijakan pendidikan yang adaptif dan berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kebutuhan penguatan sistemik dalam membangun kapasitas sekolah rural agar mampu mengadopsi praktik-praktik strategis secara optimal. Hal ini tidak hanya menuntut intervensi pada level teknis, seperti pelatihan dan infrastruktur, tetapi juga pada level budaya organisasi dan tata kelola kolaboratif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan, menyusun kebijakan afirmatif yang berbasis data kontekstual serta menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan untuk sekolah-sekolah di wilayah rural.

Lebih lanjut, penelitian ini membuka ruang bagi agenda riset lanjutan yang dapat menggali dinamika kualitatif di balik praktik perencanaan strategis, termasuk faktor kepemimpinan, budaya sekolah, dan hubungan dengan komunitas lokal. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk menilai konsistensi dan dampak jangka panjang dari implementasi strategi dalam kerangka MBS. Dengan memperkuat koneksi antara praktik perencanaan strategis dan kualitas pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam reformasi manajemen pendidikan yang berbasis keadilan spasial dan partisipasi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Agustin, P., & Effane, A. (2022). Model Pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah. *Karimah Tauhid*, 1(6), 903–907.
- Asyibli, B., Maulida, R. S., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2025). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 13(1), 75–98. <https://doi.org/10.24090/jk.v13i1.13393>
- Fitriani, R., & Permana, A. (2022). Evaluating strategic planning in school-based management: Urban school performance perspectives. *Journal of Educational Development*, 10(1), 45–60.
- Hasan Baharudin, Y., Purbosari, P., Budiarti, W. N., Dwi Kartika, W., & Inayah, L. N. (2022). Kajian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Pengembangan Sekolah Dasar. *Journal On Teacher Education*, 3(3). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jote/article/download/4601/3161>
- Junindra, A., Nasti, B., & Gistituati, N. (2022). School-Based Management In Improving The Quality Of Education In Elementary School Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal CERDAS Proklamator*, 88(1), 88–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/cerdas.v10i1.124>
- Nurkolis. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Rosyada, D., Maftuh, B., & Suryadi, A. (2019). The role of strategic planning in enhancing school-based management effectiveness in Indonesia. *International Journal of Educational Policy Studies*, 7(2), 101–114.
- Sosial dan Teknologi, J., & Wali, I. (2025). Analisis Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Stanawiyah Negeri Ambon. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(2), 143–163. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/download/31995/1465>
- Susila, F. C., Hukum, A. B., & Negara, A. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 2621–2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6604/3474>
- Wahyudi, & Sukmayadi, S. (2020). Kapasitas sekolah dalam perencanaan strategis di wilayah tertinggal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(3), 233–244.